



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CHAIRUL FADHLY HARAHAP
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS BEKASI
3. NHK : 694099

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 12.923.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/190 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/100 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.895.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/98 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/120 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/467 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 607 m2/50 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 149.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 2600 m2/20 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 199.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/131 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/220 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.385.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 205.000.000



1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
200.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp.  
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 111.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 280.844.774

F. HARTA LAINNYA Rp. 97.000.000

Sub Total Rp. 13.616.844.774

III. HUTANG Rp. 5.401.972.514

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.214.872.260

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.